

2022



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2021

DINAS PERHUBUNGAN



DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

Jalan Siliwangi Nomor 355- 357 Semarang 50146 Telepon 7604640, 7605660, 7605700
Faksimile. 7607697 Laman : <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : perhubungan@jatengprov.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
SIHHTISAR EKSEKUTIF	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.2.1 Struktur Organisasi	4
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.2.3 Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran	10
1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	13
1.3.1 Aspek Strategis Organisasi	13
1.3.2 Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	14
1.4 Landasan Hukum.....	17
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021.....	18
1.6 Sistematika Penulisan	20
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	21
2.1 Rencana Strategis.....	21
2.1.1 Visi, Misi dan Program Kerja.....	21
2.1.2 Tujuan Dan Sasaran	21
2.1.3 Strategi Dan Arah Kebijakan.....	24
2.2 Perencanaan Kinerja	25
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	26
2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	36
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021	37
3.2 Analisis Capaian Kinerja	38
3.2.1 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	38
3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	39
3.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD	40
3.2.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan	41
3.2.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	43
3.2.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	45
3.3 Realisasi Anggaran	61
3.3.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan.....	65

BAB 4 PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.1.1 Kesimpulan	68
4.1.2 Saran.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Daftar Jumlah Pegawai (ASN) Menurut Lokasi Kerja.....	10
Tabel 1.2.	Daftar Inventarisasi Barang Tahun 2021	12
Tabel 1.3.	Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021	18
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	23
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kesekretariatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	23
Tabel 2.2.	Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	24
Tabel 2.3.	Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2021 Perubahan	28
Tabel 2.4.	Dukungan Anggaran dari APBD Dinas Perhubungan TA 2021 Perubahan.....	29
Tabel 2.5.	Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan TA 2021 Perubahan Pada Urusan Perhubungan	30
Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	37
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Tahun 2021.....	38
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	39
Tabel 3.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD	40
Tabel 3.5.	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan	42
Tabel 3.6.	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan	44
Tabel 3.7.	Capaian Kinerja Tahun 2021 (Tujuan Ke-1)	45
Tabel 3.8.	Capaian Kinerja Tahun 2021 (Tujuan Ke-2)	58
Tabel 3.9.	Kebijakan Yang Diterbitkan Tahun 2021	61
Tabel 3.10	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021	61
Tabel 3.12	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pohon Kinerja Pencapaian Tujuan Dinas Perhubungan	2
Gambar 1.2	Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 1 Dinas Perhubungan	3
Gambar 1.3	Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 2 Dinas Perhubungan	3
Gambar 1.4	Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 3 Dinas Perhubungan	4
Gambar 1.5	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	5
Gambar 1.6	Bagan Struktur Organisasi BPSPP Wilayah Kelas A Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	5
Gambar 1.7	Bagan Struktur Organisasi BPSPP Wilayah Kelas B Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	6
Gambar 1.8	Bagan Struktur Organisasi Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	6
Gambar 1.9	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan (orang)	11
Gambar 1.10	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (orang)	11
Gambar 3.1	Peresmian Trans Jateng Koridor Semarang- Gubug oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 13 Oktober 2021	49
Gambar 3.2	Pembangunan Terminal Kutoarjo (tahap 1)	50
Gambar 3.3	Peresmian Peresmian Bandara Nglioram oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Desember 2021	51
Gambar 3.4	Fasilitasi Pengembangan Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa di Kabupaten Jepara	52
Gambar 3.5	Penyediaan Perlengkapan Jalan (LPJU) Terpasang Kiri Ruas Kutoarjo - Bruno Dan Kanan Ruas Karanganyar - Tawangmangu - Kalisoro- Cemorosewu.....	54
Gambar 3.6	Pemasangan Perlengkapan Jalan (Guard Rail) Kabupaten Banyumas	54
Gambar 3.7	Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V	55
Gambar 3.8	Gambar LPJU Terpasang di Lintas Penyebrangan Sungai Kendal - Batang Ds. Jatipurwo (Kendal) dan Ds. Yosorejo (Batang)	55
Gambar 3.9	Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang (EWS) di Perlintasan Sebidang Kereta Api JPL 251 Kabupaten Klaten	56
Gambar 3.10	Tampilan Si-Anteng untuk menunjang indikator Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi dan Peresmian trans jateng Koridor Semarang- Gubug	57

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, LKjIP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen nyata dinas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja dinas telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang Pebruari 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST,MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19710914 199703 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran dengan capaian pada TA. 2021 yaitu :

Capaian tujuan 1 : memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah dengan Indikator persentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di provinsi jawa tengah capaian sebesar 102,12% masuk katagori **sangat baik**. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2020 yang sebesar 100%. Tujuan 1 (satu) ini didukung oleh 3 (tiga) sasaran dengan tingkat ketercapaian kinerja:

1. Sasaran 1 : Meningkatkan Layanan Jaringan Distribusi Transportasi dengan indikator Persentase layanan jaringan distribusi transportasi capaiannya 100,02 % dengan realisasi 43,38% dari target 42,64 %. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Penerbangan dengan total 13 (tiga belas) Indikator.
2. Sasaran 2 : Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi capaiannya 107,95% dengan realisasi 21,18% dari target 19,62%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan total 10 (sepuluh) Indikator.
3. Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi dengan indikator Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal capaiannya 100 % dengan realisasi 46,67% dari target 46,67%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan total 1 (satu) Indikator.

Capaian tujuan 2 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan Indikator persentase Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 111,30% (realisasi nilai reformasi birokrasi 78,28 dari target 70,33. Dalam tujuan 2 (dua) ini didukung oleh 2 (dua) sasaran dengan tingkat ketercapaian kinerja :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Dari Survei Kepuasan Masyarakat dapat digambarkan rata – rata IKM pada Tahun 2021 untuk masing – masing pelayanan public di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah nilai 3,19, dan nilai hasil IKM 79,75 dengan mutu pelayanan B atau baik kinerjanya. Nilai IKM ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang sebelumnya nilai IKM 3.12 dan nilai hasil IKM 78 dengan mutu pelayanan B atau baik kinerjanya.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Hasil penilaian evaluasi Sistem AKIP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 75,28 termasuk dalam kategori penilaian BB (Sangat Baik) dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal

BAB 1

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen nyata dinas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 diharapkan dapat:

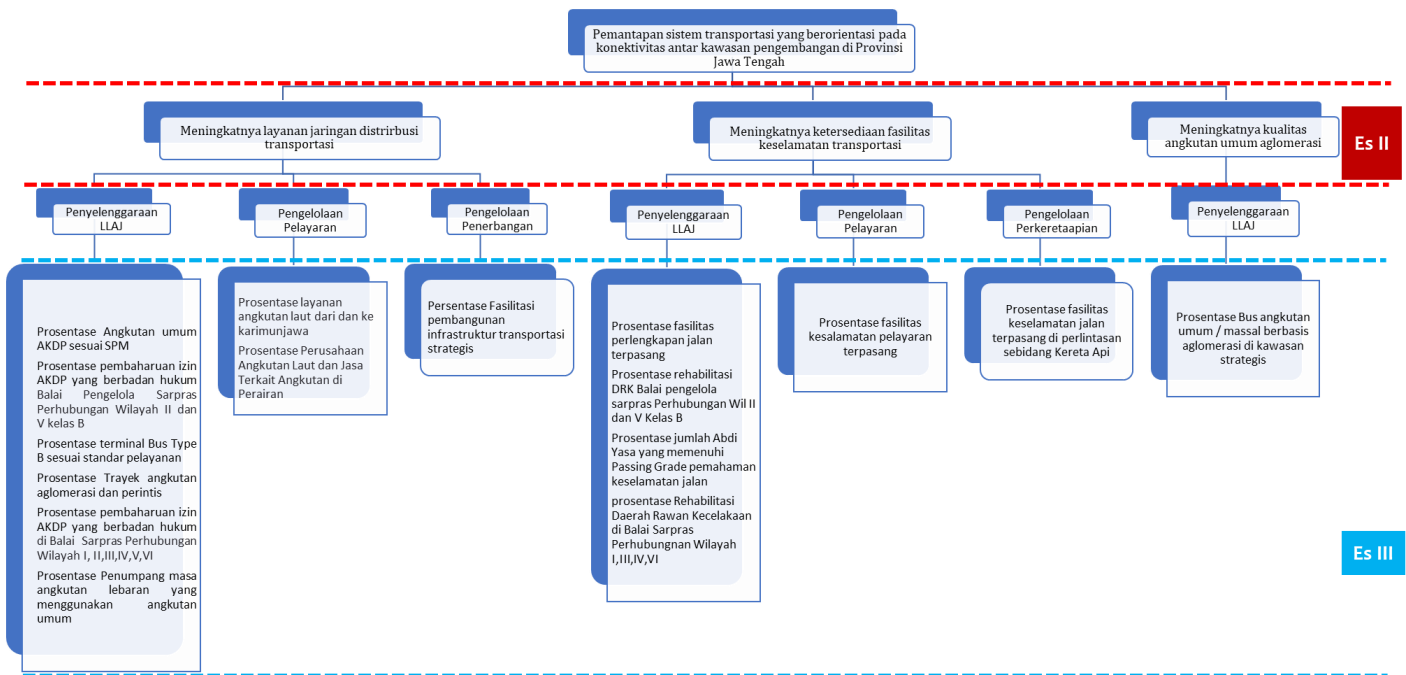
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1 Latar Belakang

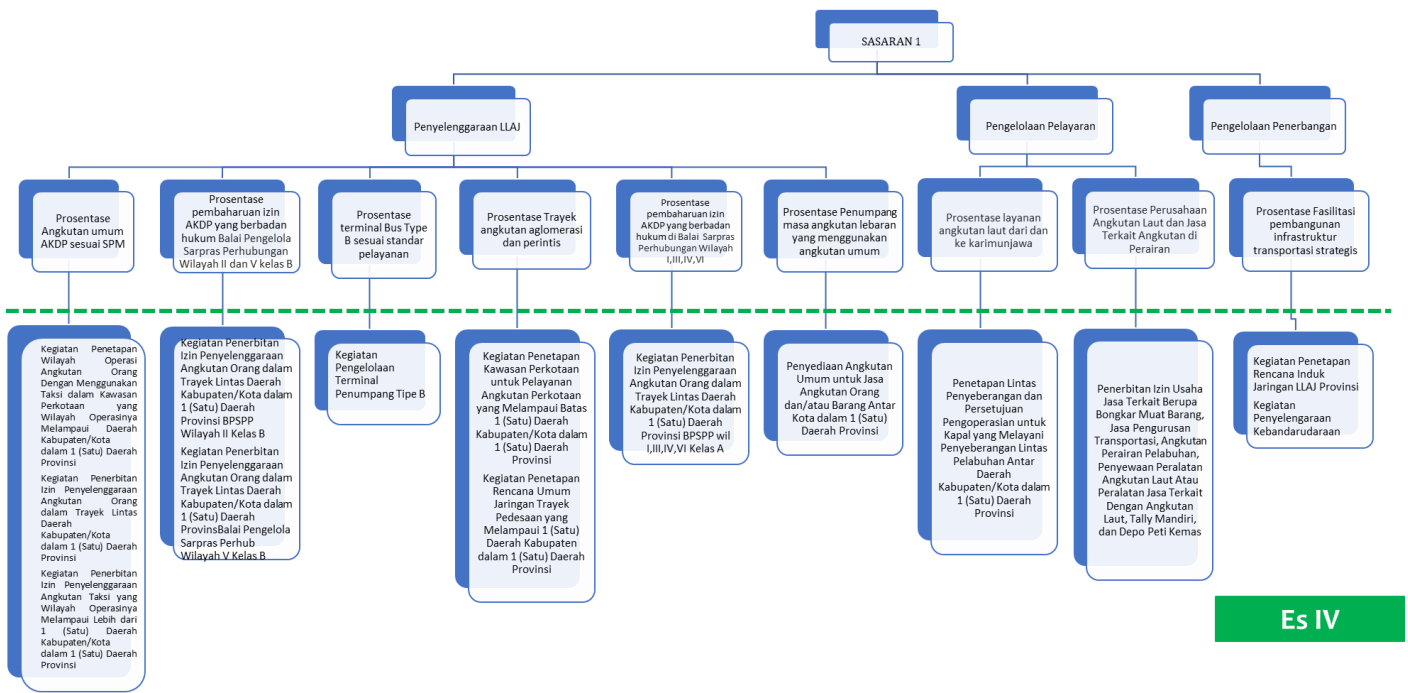
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization), setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Visi

Kepala Daerah “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dimana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantapan system transportasi yang berorientasi pada konektifitas antar kawasan sehingga memudahkan mobilitas orang/barang dengan aman, selamat dan terjangkau sesuai kemampuan masyarakat membayar pelayanan transportasi. Selain itu terdapat program kerja Kepala Daerah yang difokuskan pada sektor transportasi yaitu pada program kerja Ke-7 “Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta Dan Bandara Serta Pembangunan Embung/Irigasi”.

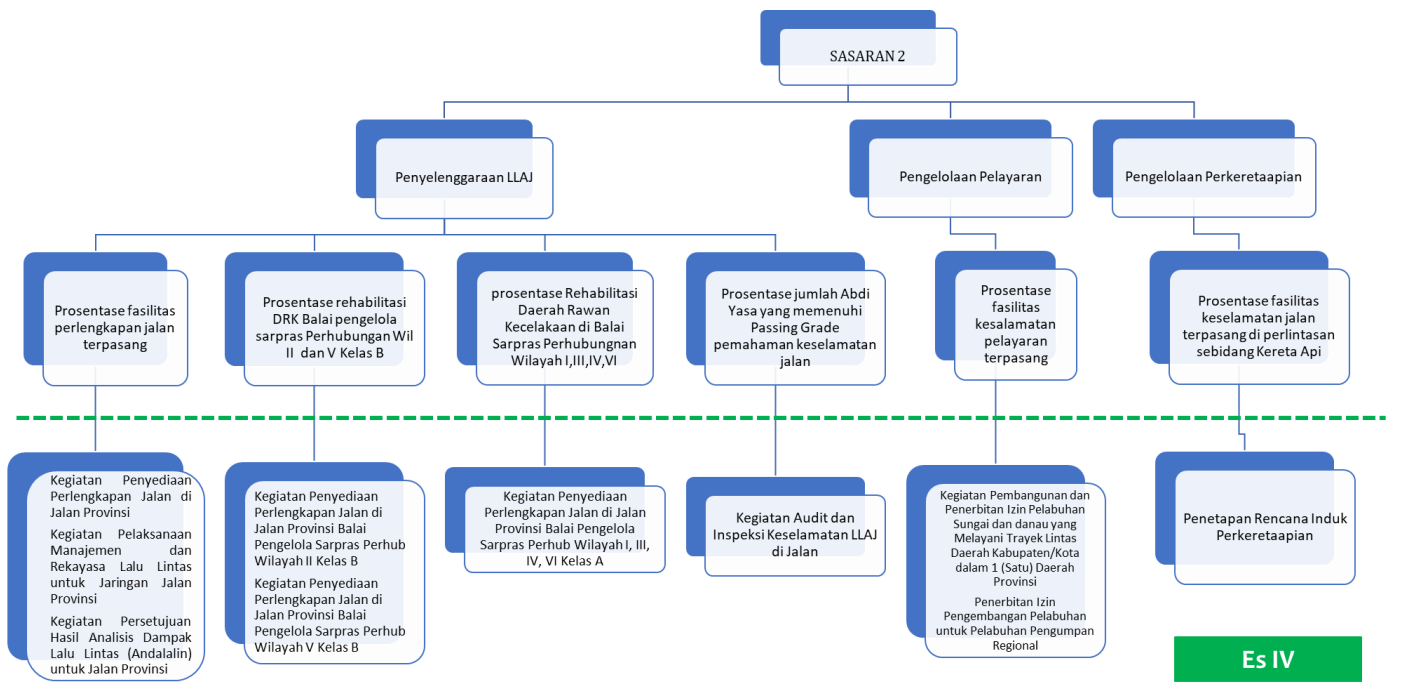
Pohon Kinerja yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan dalam mencapai Indikator Kinerja Utama, rencana kerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas. Pohon kinerja adalah sebagai berikut



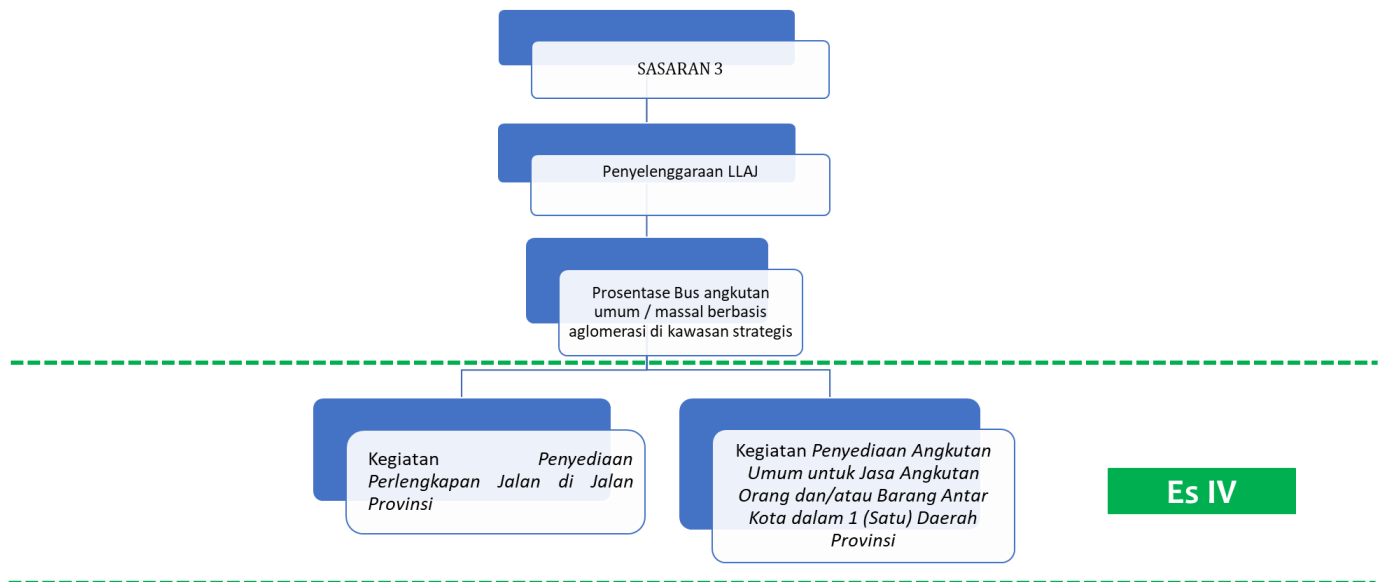
Gambar 1.1 Pohon Kinerja Pencapaian Tujuan Dinas Perhubungan



Gambar 1.2 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 1 Dinas Perhubungan



Gambar 1.3 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 2 Dinas Perhubungan



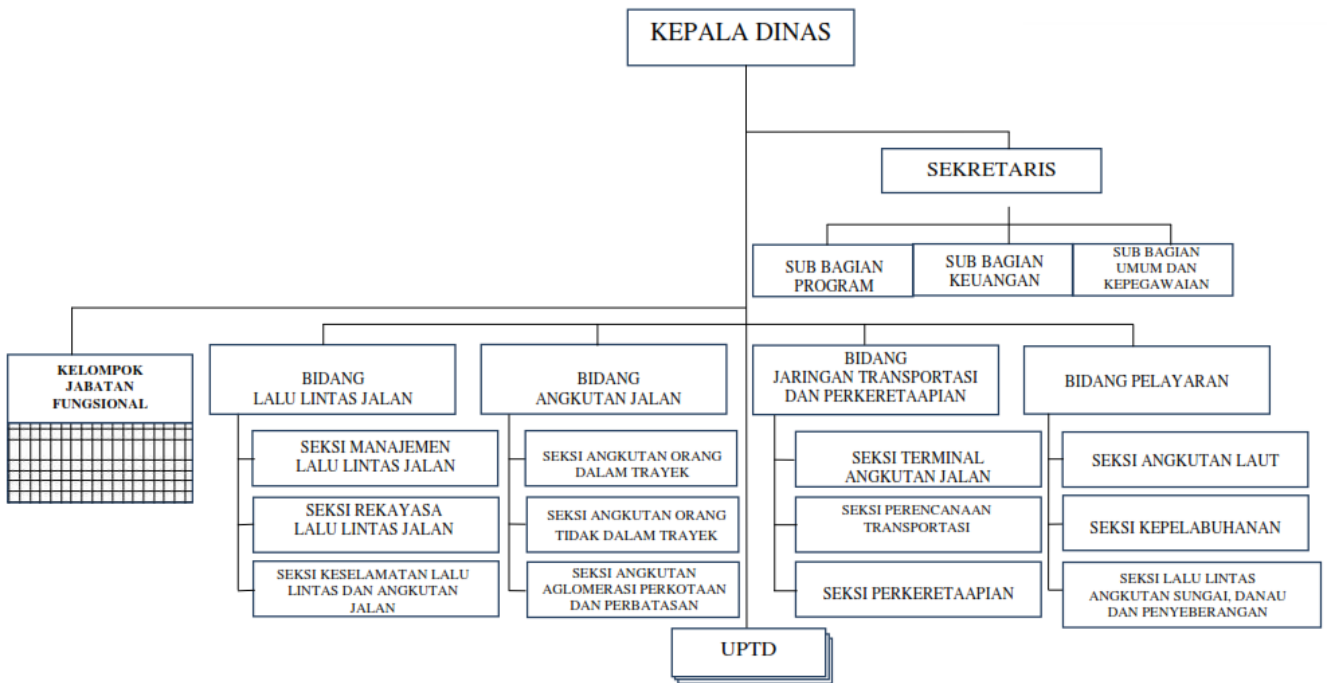
Gambar 1.4 Pohon Kinerja Pencapaian Sasaran 3 Dinas Perhubungan

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

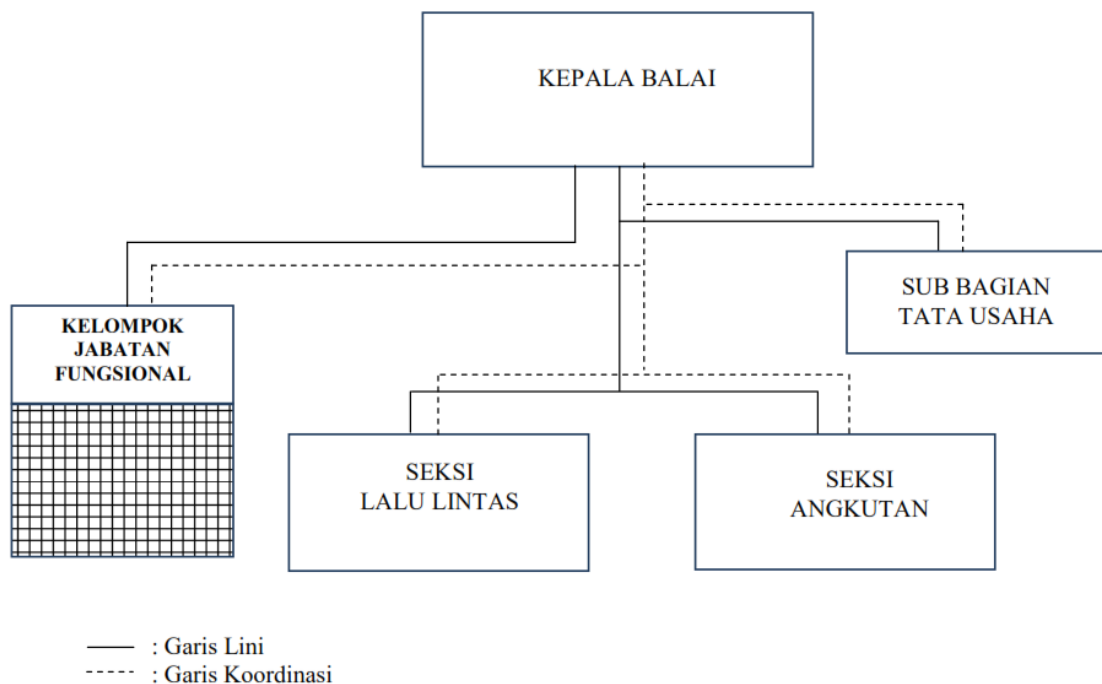
1.2.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, kedudukan Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

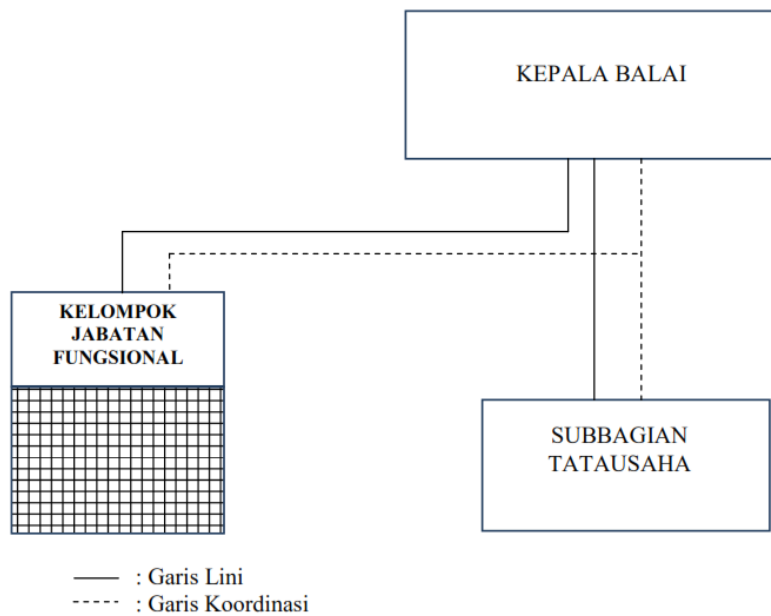
Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, Bidang Pelayaran, UPT Dinas sebanyak 6 Balai Pengelola Sarana Prasana Perhubungan Wilayah (4 BPSPP Kelas A dan 2 BPSPP Kelas B), dan Balai Transporasi Jawa Tengah serta kelompok jabatan fungsional sebagaimana gambar :



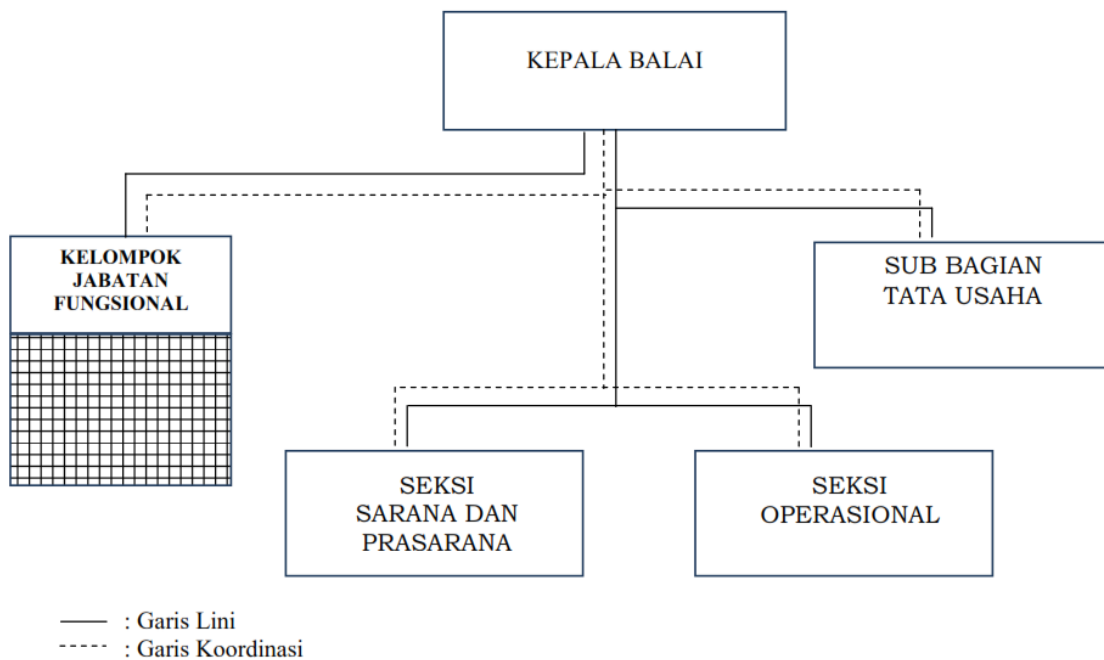
Gambar 1.5 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 1.6 Bagan Struktur Organisasi BPSPP Wilayah Kelas A Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 1.7 Bagan Struktur Organisasi BPSPP Wilayah Kelas B Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 1.8 Bagan Struktur Organisasi Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas melaksanakan fungsi:

1. perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
2. pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
4. pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya

Tugas dari anggota susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas, dengan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan
 - g. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
 - h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang manajemen Lalu Lintas Jalan, Rekayasa Lalu Lintas Jalan, dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
4. Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek, Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan;
5. Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal Angkutan Jalan, Perencanaan Transportasi, Dan Perkeretaapian.
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan transportasi;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian.
6. Bidang Pelayaran mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut, Kepelabuhanan, Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.
7. Balai Perhubungan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang lalu lintas dan angkutan, sedangkan fungsinya adalah:
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan

- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan
 - d. Pengelolaan ketatausahaan dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Balai Transportasi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah, sedangkan fungsinya adalah:
- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah
 - c. Evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah
 - d. Pengelolaan ketatausahaan dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

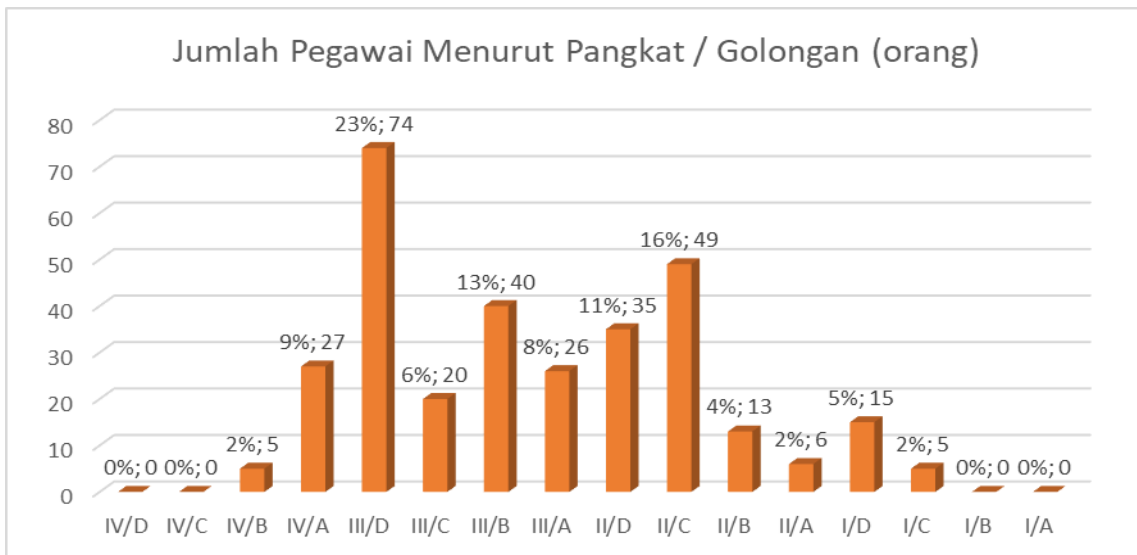
1.2.3 Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran

Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan terdiri dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Tenaga Teknis (Pegawai Tidak Tetap) yang total berjumlah 589 terdiri dari 315 ASN (46,52%) dan 274 PTT (53,48%). Data Pegawai (ASN) sebagaimana tabel :

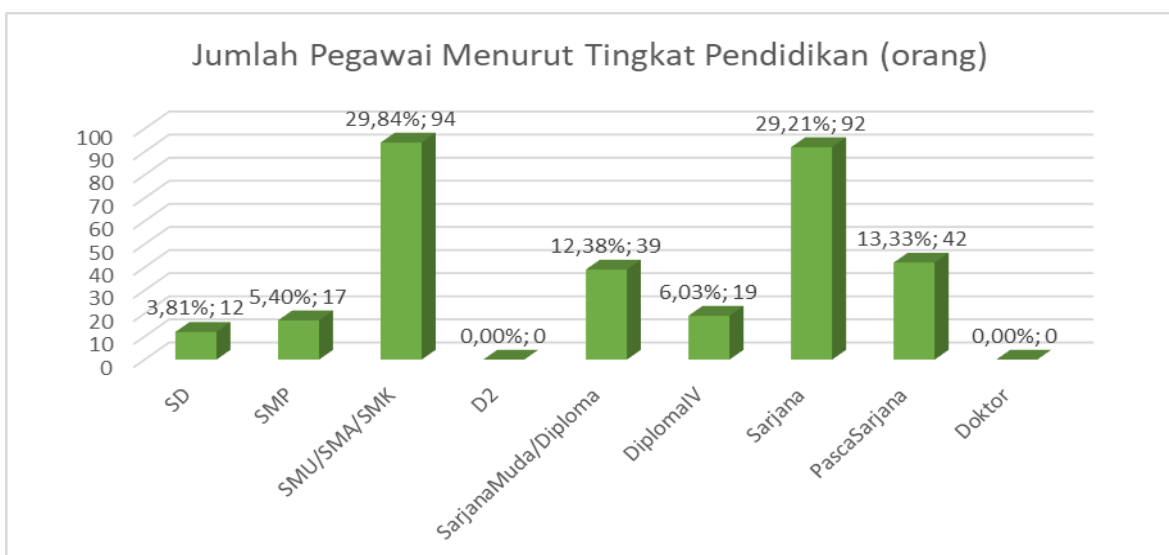
Tabel 1.1. Daftar Jumlah Pegawai (ASN) Menurut Lokasi Kerja

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	45
3	Bidang Lalu Lintas Jalan	17
4	Bidang Angkutan Jalan	12
5	Bidang Jaringan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	13

6	Bidang Pelayaran	11
7	BPSPP Wilayah I	39
8	BPSPP Wilayah II	16
9	BPSPP Wilayah III	75
10	BPSPP Wilayah IV	19
11	BPSPP Wilayah V	23
12	BPSPP Wilayah VI	23
13	Balai Transportasi Jawa Tengah	22
	Jumlah	315



Gambar 1.9 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan (orang)



Gambar 1.10 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (orang)

Dari data tersebut diketahui bahwa menurut Pangkat / Golongan, ASN yang paling banyak yaitu berpangkat/golongan III/d dengan jumlah 74 (23%) orang dan menurut tingkat pendidikan, ASN yang paling banyak berpendidikan SMU/SMA/SMK dengan 94 Orang (29,84%) dan berpendidikan Sarjana dengan 92 orang (29,21%).

Untuk Sumber Daya Aset Dinas Perhubungan sebagaimana tabel :

Tabel 1.2. Daftar Inventarisasi Barang Tahun 2021

No	Kode Barang	Nama Bidang Barang	Saldo Akhir Tahun 2020	
			Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)
1	1.3.1.01	TANAH	156	171.213.249.453,00
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	21	1.954.691.741,00
3	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	137	30.533.434.421,00
4	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	133	4.999.033.200,00
5	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-	-
6	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.015	7.632.213.047,00
7	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	296	2.262.206.176,00
8	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	-	-
9	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	4	163.343.000,00
10	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	18	31.204.725,00
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	613	5.429.639.131,00
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	62	20.138.387.782,00
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	6	8.601.440,00
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	403	106.870.484.367,00
22	1.3.3.02	MONUMEN	-	-
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	2	535.357.815,00
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1	238.316.000,00
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	33	26.490.311.880,00
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	15	15.158.134.030,00
27	1.3.4.03	INSTALASI	641	17.898.252.585,00

28	1.3.4.04	JARINGAN	1.570	30.700.485.076,00
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	136	26.090.000,00
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	22	387.710.000,00
31	1.3.5.03	HEWAN	-	-
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-
33	1.3.5.05	TANAMAN	42	39.465.000,00
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	16	2.354.373.747,00
			6.342	445.064.984.616,00

Sumber : Dinas Perhubungan

Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang kerja, ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah cukup memadai.

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1.3.1 Aspek Strategis Organisasi

Visi Kepala Daerah "Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi" dimana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung upaya tersebut melalui Tujuan Organisasi dengan memantapkan system transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah sehingga memudahkan mobilitas orang/barang dengan aman, selamat dan terjangkau serta pemenuhan Infrastruktur perhubungan strategis dalam menunjang pengembangan wilayah di Jawa Tengah, diantaranya terkait dengan Pengembangan wilayah di Jawa Tengah dikaitkan dengan adanya Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) serta Kawasan Industri Terpadu sesuai dengan Misi Gubernur Jawa Tengah Periode 2018 –

2023 serta program kerja Ke-7 “Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta Dan Bandara Serta Pembangunan Embung/Irigasi”.

Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah ke-7 “Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah” pada tujuan ke-4 “Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan” dari misi ke-3 yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”. Tujuan organisasi tersebut dijabarkan dalam Sasaran organisasi yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran tersebut adalah Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi, Meningkatkan ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi dan Meningkatkan kualitas angkutan umum aglomerasi.

1.3.2 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, isu-isu strategis memuat review faktor pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan OPD; sasaran jangka menengah Renstra K/L, OPD Provinsi/Kabupaten/Kota; implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; implikasi KLHS bagi pelayanan OPD. Isu-isu Strategis sebagai berikut

1. Konektivitas

- a. Belum optimalnya pelayanan inter/antarmoda transportasi yang menghubungkan bandara, pelabuhan, terminal dan stasiun;
- b. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat kegiatan strategis

2. Simpul

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan terminal angkutan penumpang tipe B dan terminal angkutan barang
- b. Belum optimalnya keselamatan dan pelayanan perhubungan udara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Jawa Tengah
- c. Belum optimalnya pelayanan pelabuhan pengumpan regional dan pelayanan dermaga penyeberangan dalam mendukung distribusi angkutan orang dan barang di Jawa Tengah

3. Ruang Pergerakan

- a. Tingginya volume kendaraan (LHR) di jalan raya yang mengakibatkan kemacetan
- b. Belum seimbang pertumbuhan antara jaringan kereta api dengan permintaan perjalanan dengan menggunakan moda kereta api

4. Keselamatan

- a. Tingginya angka kecelakaan di jalan raya dan perlintasan KA
- b. Belum optimalnya penanganan prasarana dalam mendukung keselamatan pelayaran dan Udara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 terdapat 2 (dua) isu strategis pembangunan daerah yang juga berkaitan dengan pelayanan OPD Dinas Perhubungan yaitu :

1. Isu Pemulihan Pandemi Covid-19

Dalam isu Strategis Pemulihan Pandemi Covid-19 ke-3 adalah ekonomi yaitu dari sektor transportasi sebagai pendukung pembangunan ekonomi juga mengalami dampak cukup signifikan selama masa pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah untuk menghentikan penularan virus Covid-19 dengan melakukan pembatasan pergerakan manusia dari dan menuju luar daerah/negara menyebabkan terhentinya operasional usaha transportasi umum darat, laut, dan udara. Hal tersebut berakibat pada penurunan pendapatan para pelaku

usaha di bidang transportasi termasuk pelaku usaha yang berdampingan dengan sektor transportasi seperti UMKM, karena ditutupnya usaha yang ada di terminal atau bandara.

Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah Pemberdayaan Masyarakat (Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan/KMSK) untuk pemeliharaan / Mempertahankan Fungsi Sarpras dan atau Faskes Jalan. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi dengan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan yang ada pada 6 (enam) wilayah Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan. Output kegiatan adalah Jumlah anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan sebanyak 302 orang yang bertugas di 151 ruas jalan provinsi (dari total penggal ruas jalan provinsi 168 ruas jalan). 1 (satu) anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan melaksanakan kegiatan sebanyak 28 kali (hari) dalam satu tahun dan mendapat Honorarium sebesar Rp.100.000,- (Orang/Hari). Selain dari APBD Dinas Perhubungan terdapat Alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Penanganan Covid-19 yang dilalukan melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang salah satunya diperuntukan untuk Bantuan tunai jaring pengaman sosial kepada supir, kondektur dan pekerja perusahaan bus angkutan umum sesuai kewenangan provinsi dan bus angkutan pariwisata domisi Jawa Tengah terdampak PPKM level 3 dan 4 pada 35 Kabupaten/Kota

2. Isu Strategis Daerah

Dalam isu strategis Daerah ke-6 adalah kesenjangan wilayah yaitu Meskipun ketimpangan antar wilayah di Jawa Tengah semakin menurun, namun masih perlu ditangani kesenjangan akses antara desa-kota maupun antara kota-kota (kawasan aglomerasi perkotaan) dan antar wilayah utamanya aksesibilitas – konektivitas wilayah Pantura – Pansela dan wilayah tengah Jawa Tengah, integrasi antar moda transportasi serta distribusi barang – jasa yang memadai. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat

pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa.

Untuk mendukung hal tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi dalam peningkatan aksesibilitas dan mobilitas utamanya untuk menunjang kegiatan perekonomian (pariwisata dan industri) yaitu penyediaan angkutan umum massal melalui lanjutan operasional 5 (lima) koridor Trans Jateng (Koridor Semarang-Bawen, Semarang-Kendal, Purwokerto-Purbalingga, Solo-Sumberlawang (via Sangiran), Kutoarjo-Borobudur dan pembukaan 1 (satu) koridor baru pada Wilayah Pengembangan Kedungsepur (Koridor Semarang-Gubug Via Godong). Selain itu pada tahun 2021 juga dilakukan Dukungan/Fasilitasi terhadap rencana pengembangan infrastruktur strategis pengembangan bandara yaitu Bandara Dewadaru, Karimunjawa Kabupaten Jepara berupa sharing pembebasan lahan untuk pengembangan sisi darat bandara (pengembangan terminal penumpang), Bandara Ngloram Kabupaten Blora berupa sharing pembebasan lahan untuk akses jalan masuk, fasilitas pemadam kebakaran dan rumah dinas serta fasilitasi penerbangan komersial perdana Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga. Dalam pengembangan perkeretaapian dilakukan fasilitasi revitalisasi jalur kereta diantaranya fasilitasi reaktivasi jalur KA Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, fasilitasi pembangunan jalur ganda Solo-Semarang Fase I (Solo Balapan-Kadipiro) dan fasilitasi operasional Kereta Rel Listrik (KRL) rute Jogja-Solo sebagai pengganti KA Pramex.

1.4 Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023
7. Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021

Rangkuman Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021 sebagaimana tabel

Tabel 1.3. Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Memastikan seluruh dokumen SAKIP telah dipublikasikan di website Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat	Telah dipublikasikan di website PPID Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	http://www.perhubungan.jatengprov.go.id
2	Membudayakan pemberian reward	1. Penyusunan Peraturan Kepala Dinas Perhubungan	1. Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor

	and punishment	<p>Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/445/2021 tentang pedoman pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>2. Penyusunan Surat Edaran Nomor 800/16356 tanggal 4 Oktober 2021 tentang pedoman pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>800/445/2021 tentang pedoman pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>2. Surat Edaran Nomor 800/16356 tanggal 4 Oktober 2021 tentang pedoman pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.</p>
3	Berkoordinasi dengan Bappeda dan Biro Organisasi Setda Prov Jateng untuk menentukan perubahan target kinerja apabila terjadi refocusing anggaran yang berpotensi tercapainya target kinerja yang sudah ditetapkan.	Telah melakukan penyesuaian target kinerja melalui surat kepada Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 Juni 2020 dengan nomor surat 050/12082 hal target indikator kinerja pembangunan tahun 2020	Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah No. 050/12082 hal target indikator kinerja pembangunan tahun 2020
4	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengacu pada Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan LKjIP 2021 akan menyesuaikan Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan LkjiP Tahun 2021
5.	Menyelesaikan tindak lanjut hasil	Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan berdasarkan surat	Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah no 900/18647 hal

pemeriksaan pengawas eksternal (BPK RI) dan pengawas Internal (APIP) yang belum selesai di tindak lanjuti	Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/2557 tanggal 11 September 2020 perihal penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Penyelesaian TLRHP BPK-RI tanggal 29 September 2020
---	---	---

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang ringkasan / ikhtisar perencanaan dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi, dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi, Misi dan Program Kerja

Visi Kepala Daerah “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dimana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantapan system transportasi yang berorientasi pada konektifitas antar kawasan sehingga memudahkan mobilitas orang/barang dengan aman, selamat dan terjangkau sesuai kemampuan masyarakat membayar pelayanan transportasi.

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub rukun untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan gubernur No. 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdapat program kerja Kepala Daerah yang difokuskan pada sektor transportasi yaitu pada program kerja Ke-7 “Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta Dan Bandara Serta

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Adapun tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

“Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah”, dengan indikator tujuan prosentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah, diharapkan pada akhir tahun 2023 mencapai 59,50%. Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah ke-7 “Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah” pada tujuan ke-4 “Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan” dari misi ke-3 yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk mendukung pencapaian tujuan dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi, dengan indikator prosentase layanan jaringan distribusi transportasi pada tahun 2023 sebesar 60,38%
2. Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi dengan indikator prosentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi pada tahun 2023 sebesar 51,45%
3. Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi dengan indikator prosentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal pada tahun 2023 sebesar 66,67%

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah		Prosentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	25,59	34,45	42,37	49,87	59,5	59,5
		Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	prosentase layanan jaringan distribusi transportasi	34,75	42,12	49,08	54,46	60,38	60,38
		Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	prosentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	8,69	21,22	31,36	41,82	51,45	51,45
		Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi	prosentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	33,33	40	46,67	53,33	66,67	66,67

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kesekretariatan Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah		Nilai Reformasi Birokrasi	65,13	67,73	70,33	72,93	75,50	75,50
		Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	60	65	70	75	80	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip	70,25	70,45	70,65	70,85	71,00	71,00

2.1.3 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Misi dan program kerja tersebut maka dirumuskan strategi 5 (lima) tahun mendatang. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa. Adapun strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel :

Tabel 2.3. Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan
1	Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	Meningkatkannya layanan jaringan distribusi transportasi	Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan.dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah	Tahun I s.d Tahun V : 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung wilayah pengembangan kawasan strategis, KSPN dan KSP di Jawa Tengah. 2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan daerah dalam Fasilitas Revitalisasi Kereta Api, Pengembangan Pelabuhan dan pengembangan Bandar Udara 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang perhubungan 4. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sarana dan prasarana serta pelayanan di Bidang Perhubungan
		Meningkatkannya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan.dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah	Tahun I s.d Tahun V : 1. Peningkatan fasilitas keselamatan transportasi di jalan, perlintasan KA, Pelabuhan dan Dermaga 2. Peningkatan edukasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat terkait penyelenggaraan urusan perhubungan dan keselamatan transportasi 3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan

				dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan
		Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi	Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) berbasis Sustainable Transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi pengembangan Kawasan Strategis Wilayah secara menyebar dan merata	Tahun I s.d Tahun V : 1. Peningkatan pelayanan angkutan umum yang inklusif dan memadai disertai dengan evaluasi kemampuan penyelenggara, dan pengembangan jumlah koridor angkutan aglomerasi. 2. Peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat dengan menerapkan system Badan Layanan Umum Daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah

2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja menjabarkan dari tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam target perubahan renstra :

NO	Tujuan/Sasaran/Program / Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021
1	Memantapkan Sistem Transportasi Yang Berorientasi Pada Konektivitas Antar Kawasan Pengembangan Di Provinsi Jawa Tengah		Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	%	36,31
		Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	42,64
		Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	19,62
		Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	46,67
2	Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah		Nilai Reformasi Birokrasi	Angka	70,33
		Meningkatnya kualitas	Nilai Kepuasan	Angka	

NO	Tujuan/Sasaran/Program / Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021
		pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat		70
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Sakip	Angka	70,65

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 merupakan target kinerja tahun ke-3 dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, yang memuat sasaran strategis indikator kinerja tugas fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah.

Tabel 2.4. Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2021 Perubahan

No	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Tujuan			
	Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	Prosentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	36,31%
Sasaran			
1.	Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Prosentase layanan jaringan distribusi transportasi	42,64%
2.	Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Prosentase Pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	19,62%
3.	Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi	Prosentase operasional angkutan umum Aglomerasi yang nyaman dan handal	46,67%
Tujuan			
	Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Reformasi Birokrasi	70,33
Sasaran			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	70
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP perangkat daerah	70,65

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Perubahan

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2021 tersebut, Dinas Perhubungan mendapat dukungan anggaran dari APBD yang digunakan untuk melaksanakan 5 Program sebagai berikut.

Tabel 2.5. Dukungan Anggaran dari APBD Dinas Perhubungan TA 2021
Perubahan

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	118.288.387.000
2	Program Pengelolaan Pelayaran	1.537.733.000
3	Program Pengelolaan Penerbangan	23.580.487.000
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.842.000.000
5	Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah	58.864.258.000
TOTAL ANGGARAN		204.112.865.000

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Perubahan

Secara lengkap tabel program dan kegiatan urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan TA 2021 Perubahan Pada Urusan Perhubungan

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	Penanggung Jawab
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	50.15	160.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	18.75	249.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org)	Orang	50	10.000.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok)	Lokasi	3	20.000.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	Buah	2	150.000.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	Buah	40	195.156.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	Unit	30	310.000.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	m	9252	71.526.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Penggantian LPJU (unit)	Unit	49	1.210.000	SEKSI LALU LINTAS
		Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terdata pada ruas jalan provinsi (%)	%	100	13.177.000	SEKSI LALU LINTAS
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kendaraan angkutan penumpang dan barang diperiksa (Kend)	Unit	0	169.650.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend)	Unit	43124	46.859.000	SEKSI ANGKUTAN
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok)	Lokasi	3	7.450.000	SEKSI ANGKUTAN
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend)	Unit	181	166.400.000	SEKSI ANGKUTAN
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	Unit	18	52.050.000	SEKSI ANGKUTAN
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org)	Orang	52	15.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
		Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok)	Lokasi	2	16.500.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	Buah	3	180.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	Buah	33	175.006.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	Unit	36	369.400.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	m	8548	58.994.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
		Jumlah Penggantian LPJU (unit)	Unit	53	4.900.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
		Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terdata pada ruas jalan provinsi (%)	%	100	115.586.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend)	Unit	9349	30.500.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok)	Lokasi	2	6.310.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	Penanggung Jawab
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum (Kend)	Unit	141		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	Unit	12	4.124.234.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
Balai Transportasi Jawa Tengah						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	%	31.92	86.858.617.000	Balai Transportasi Jawa Tengah
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Pemeliharaan Shelter BRT Trans Jateng	Paket	5		SEKSI SARANA DAN PRASARANA
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koridor Pelayanan BRT Trans Jateng Kawasan Kedungsepur 3 Koridor dan Subosukowonosraten 2 Koridor, Purwomanggung 1 Koridor, kawasan barlingmascakeb 1 Koridor	Unit	6		SEKSI OPERASIONAL
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	48.99	166.400.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	37.5	132.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org)	Orang	52	20.000.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok)	Lokasi	2	25.000.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	Buah	4	125.000.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	Buah	50	174.330.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	Unit	25	299.400.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	m	8516	78.332.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Penggantian LPJU (unit)	Unit	45	40.160.000	SEKSI LALU LINTAS
		Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terdata pada ruas jalan provinsi (%)	%	100	237.360.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend)	Unit	377334	66.040.000	SEKSI ANGKUTAN
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok)	Lokasi	11	13.950.000	SEKSI ANGKUTAN
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend)	Unit	140		SEKSI ANGKUTAN
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	Unit	20		SEKSI ANGKUTAN
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	82.49	140.800.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	17.24	159.500.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org)	Orang	44	20.000.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok)	Lokasi	2	30.000.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	Buah	4	150.000.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	Buah	60	175.069.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	Unit	30	228.700.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	m	8548	87.631.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Penggantian LPJU (unit)	Unit	40	21.990.000	SEKSI LALU LINTAS

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	Penanggung Jawab
		Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terdata pada ruas jalan provinsi (%)	%	100	212.320.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend)	Unit	76013	10.800.000	SEKSI ANGKUTAN
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok)	Lokasi	5	5.310.000	SEKSI ANGKUTAN
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend)	Unit	247		SEKSI ANGKUTAN
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	Unit	15		SEKSI ANGKUTAN
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	78.08	163.950.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	15.38	257.000.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org)	Orang	52	5.000.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok)	Lokasi	3	50.000.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	Buah	1	150.000.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	Buah	100	177.685.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	Unit	30	12.500.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	m	8548	282.050.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh)	Buah	50	54.415.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Penggantian LPJU (unit)	Unit	45	18.244.000	SEKSI LALU LINTAS
		Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terdata pada ruas jalan provinsi (%)	%	100	124.160.000	SEKSI LALU LINTAS
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend)	Unit	35012	27.897.000	SEKSI ANGKUTAN
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok)	Lokasi	5	10.250.000	SEKSI ANGKUTAN
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend)	Unit	207		SEKSI ANGKUTAN
		Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan)	Unit	15		SEKSI ANGKUTAN
Bidang Lalu Lintas						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	%	23.86		Bidang Lalu Lintas
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	%	3.89		Bidang Lalu Lintas
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	30	500.000.000	Bidang Lalu Lintas
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	46.15	3.690.700.000	Bidang Lalu Lintas
		Pengadaan dan Pemasangan APILL	Unit	2	478.000.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN
		Pengadaan dan Pemasangan LPJU	Unit	174	391.000.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN
		Pengadaan dan Pemasangan Rambu	Buah	478	200.000.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN
		Pengadaan dan Pemasangan RPPJ	Unit	46	59.646.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN
		Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	Unit	8	32.221.000	SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN
	Pelaksanaan Manajemen dan	Jumlah Peserta Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng Lomba Tertib Lalin	Kabupaten/Kota	14	84.340.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	Penanggung Jawab
	Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Tingkat Nasional (Kab/Kota)				
		Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (Rekomendasi)	Unit	6	134.376.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN
		Supervisi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (Lok)	Lokasi	14	45.500.000	SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalalin di Jalan Provinsi (Dok)	Dokumen	20	57.251.000	SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN
		Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Penumpang dan Barang diperiksa (Kend)	Unit	720		SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
		Jumlah Pengawasan Perusahaan Karoseri Terdaftar (Perusahaan)	Unit	40		SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Bidang Angkutan Jalan						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	%	4.87		Bidang Angkutan Jalan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	39.56		Bidang Angkutan Jalan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	64.7		Bidang Angkutan Jalan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum	%	85.58	1.434.147.000	Bidang Angkutan Jalan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	%	28.57	228.956.000	Bidang Angkutan Jalan
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (Lok)	Lokasi	28	32.800.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
		Jumlah studi / kajian pengembangan angkutan aglomerasi (Dok)	Dokumen	2	40.078.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	jumlah fasilitasi angkutan perintis (Trayek)	Unit	1	11.198.000	SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN
	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah fasilitasi angkutan lanjutan di simpul transportasi (Lok)	Lokasi	1		SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
		Jumlah fasilitasi layanan angkutan kawasan untuk mendukung kawasan pariwisata strategis (Kawasan)	Unit	1	60.940.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
		Jumlah penerbitan perizinan trayek AKDP (Penerbitan)	Dokumen	407	28.223.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
		Jumlah Perusahaan AKDP yang memenuhi Standar Pelayanan Angkutan Orang (Perusahaan)	Dokumen	30		SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah evaluasi kebutuhan pelayanan dan SPM angkutan orang tidak dalam trayek (layanan)	Unit	1	391.644.000	SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan	%	20.31	2.723.158.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	Penanggung Jawab
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Studi Jaringan Transportasi (dok)	Dokumen	3	8.830.000.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI
		Pembangunan Terminal (Terminal)	Unit	1	27.850.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN
		Pengembangan Terminal (Terminal)	Unit	6	166.400.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN
		Supervisi dan Bimbingan Teknis penyelenggaraan Terminal Type B (kali)	Kali	4	126.800.000	SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B						
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org)	Orang	52	10.600.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
		Jumlah Pengangan daerah rawan kecelakaan (lok)	Lokasi	2	25.600.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh)	Buah	2	44.350.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh)	Buah	50	125.800.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Gazon (bh)	Buah	25	175.500.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam)	Unit	25	19.350.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m')	m	9032	34.350.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh)	Buah	75	284.400.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Water Barrier (bh)	Buah	25	28.650.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
		Jumlah Penggantian LPJU (unit)	Unit	45	11.570.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
		Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terdata pada ruas jalan provinsi (%)	%	100	173.275.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
		Jumlah kendaraan terdata pada terminal tipe B	Unit	87331	40.046.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelayanan posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Lokasi	4	8.900.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP	Unit	252		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
		Jumlah perusahaan angkutan umum AKDP yang dibina	Unit	13	1.126.828.000	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
Balai Transportasi Jawa Tengah						
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	%	64.43		Balai Transportasi Jawa Tengah
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-Karimunjawa (trip)	Kali	0		SEKSI SARANA DAN PRASARANA
Bidang Pelayaran						
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	%	25	64.087.000	Bidang Pelayaran
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	%	40.86		Bidang Pelayaran
		Jumlah BAP Peninjauan lapangan dan Verifikasi serta penerbitan	Unit	10	36.628.000	SEKSI ANGKUTAN LAUT

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome), KEGIATAN (Output)	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	Penanggung Jawab
		Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubahan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (SIUP Baru)				
		Jumlah Bintek Penyelenggaraan dan perusahaan bongkar muat barang (org)	Orang	0	200.000.000	SEKSI ANGKUTAN LAUT
		Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja ASDP	Buku	12	75.265.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
		Jumlah PJU Terpasang di dermaga sungai (unit)	Unit	9	8.395.000	SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Penqumpan Regional	Jumlah Evaluasi & monitoring faspel, kinerja pelabuhan (Pelabuhan),	Unit	14	15.630.000	SEKSI KEPELABUHANAN
		Jumlah Penyusunan buku fasilitas pelabuhan di Jateng (buku),	Buku	10	10.900.000	SEKSI KEPELABUHANAN
		Jumlah Rakor Pengembangan Pelabuhan (Lok)	Lokasi	2		SEKSI KEPELABUHANAN
		Jumlah Sosialisasi SOP perijinan kepelabuhanan (Lok)	Lokasi	2	102.615.000	SEKSI KEPELABUHANAN
Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian						
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Penyelenggaraan Kebandarudaraan	Persentase Fasilitas pembangunan infrastruktur transportasi strategis	%	33.33	23.477.872.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
		Fasilitas pengembangan bandar udara di Jawa Tengah (lokasi)	Lokasi	1		SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI
		Pengadaan tanah untuk pembangunan bandara (paket)	Paket	2	546.050.000	SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	%	9.09	427.724.000	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Early Warning System (lok)	Lokasi	1	868.226.000	SEKSI PERKERETAAPIAN
		Jumlah Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang (lok)	Lokasi	6	160.000.000	SEKSI PERKERETAAPIAN
		Jumlah Pengaman penunjang keselamatan di perlintasan sebidang (lok)	Lokasi	4	249.000.000	SEKSI PERKERETAAPIAN

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja adalah Government Resources Management System Provinsi Jawa Tengah, (GRMS) adalah bangunan system aplikasi terintegrasi pemerintah provinsi jawa tengah. Sistem aplikasi yang terdiri atas; system e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, e-monev dan gph, serta aplikasi networking terdiri atas; system cloud server, video/audio streaming, DNSX filter, voip gateway server, nms, ap controller, the dude dan inventarisasi pun mulai diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Muara dalam system ini adalah integrasi antar data didalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan system pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan public dan pembangunan sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Produk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Tingkat Ketercapaian Kinerja
1	≥ 91%	Sangat Tinggi
2	76 – 90,99%	Tinggi
3	66 – 75,99%	Sedang
4	51 - 65,99%	Rendah
5	≤ 50,99%	Sangat rendah

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Realisasi capaian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 telah mencapai nilai yang ditargetkan. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur perhubungan di Jawa Tengah serta mendukung Ketercapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan didukung melalui 4 program, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran, Program Pengelolaan Penerbangan dan Program Pengelolaan Perkeretaapian.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan "Sangat Baik" yaitu dengan capaian tujuan 1 : memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di provinsi jawa tengah dengan Indikator persentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di provinsi jawa tengah sebesar 101,24% dan capaian tujuan 2 : meningkatnya tata kelola organisasi dinas perhubungan provinsi jawa tengah dengan Indikator Nilai Reformasi Birokrasi,93 sebesar 111,30 %. sebagaimana berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Kategori
A	MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	%	36,31	37,08	102,12	Sangat Tinggi
1	MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	42,64	43,38	101,73	Sangat Tinggi
2	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	19,62	21,18	107,95	Sangat Tinggi
3	MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	46,67	46,67	100,00	Sangat Tinggi
B	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai Reformasi Birokrasi,93	Angka	70,33	78,28	111,30	Sangat Tinggi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	70	79,25	113,21	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Angka	70,65	77,31	109,43	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas diketahui bahwa Tingkat Ketercapaian Kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan baik dalam urusan Perhubungan dan Urusan Penunjang masuk katagori sangat tinggi.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana dalam tabel berikut

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	%	25,59	26,21	102,42	30,01	30,01	100	36,31	37,08	102,12
1	MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	34,75	36,02	103,65	37,84	37,84	100	42,64	43,38	101,73
2	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	8,69	9,26	106,56	12,19	12,85	105,41	19,62	21,18	107,95
3	MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	33,33	33,67	101,02	40,00	40,00	100	46,67	46,67	100,00
B	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai Reformasi Birokrasi,93	Angka	65,13	74,84	114,91	67,73	77,66	114,66	70,33	78,28	111,30
1	Meningkatnya	Nilai Kepuasan	Angka	60,00	74,00	123,33	65,00	78,00	120,00	70	79,25	113,21

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat										
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Angka	70,25	75,68	107,73	70,45	77,31	109,74	70,65	77,31	109,43

Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pada tahun 2021 selalu mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya baik dalam urusan Pemerintah Bidang Perhubungan dan Penunjangurusan Pemerintahan Daerah. Untuk capaian kinerja pertahunnya selama 3 (tiga) tahun selalu tercapai dengan tingkat capaian $\leq 100\%$.

3.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD

Untuk mengetahui tingkat Capaian Kinerja Terhadap RPJMD sebagaimana dalam tabel berikut

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMD

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD 2023	Tingkat Capaian Kinerja Terhadap RPJMD (%)	Tingkat Kemajuan
A	MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	%	37,08	42,37	87,51	Akan Tercapai
1	MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	43,38	42,64	71,845	Akan Tercapai
2	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	21,18	51,45	41,11	Perlu Upaya Keras
3	MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan	%	46,67	66,67	70,00	Akan Tercapai

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD 2023	Tingkat Capaian Kinerja Terhadap RPJMD (%)	Tingkat Kemajuan
		handal					
B	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai Reformasi Birokrasi,93	Angka	78,28	70,33	111,30	Tercapai
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	79,25	80	99,06	Akan Tercapai
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Angka	77,31	71	108,89	Tercapai

Kategori tingkat ketercapaian kinerja terhadap RPJMD :

- 1) Tercapai : $\geq 100\%$
- 2) Akan Tercapai : $\geq 60\% - < 100\%$
- 3) Perlu Upaya Keras : $< 60\%$

Capaian kinerja tujuan 1 (satu) terhadap target akhir RPJMD dengan indikator Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah tercapai sebesar 87,51% masuk dalam katagori akan tercapai, dengan 2 (dua) indikator sasaran masuk dalam katagori akan tercapai yaitu Persentase layanan jaringan distribusi transportasi tercapai sebesar 71,845% dan Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal tercapai sebesar 70% serta 1 (satu) indikator masuk dalamkatagori perlu upaya keras yaitu Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi dengan tercapai sebesar 41,11%.

Capaian kinerja tujuan 2 (dua) terhadap target akhir RPJMD dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi tercapai sebesar 111,30% masuk dalam katagori tercapai, dengan dengan 1 (satu) indikator sasaran masuk dalam katagori akan tercapai yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat tercapai sebesar 99,06% dan dengan 1 (satu) indikator sasaran masuk dalam katagori tercapai yaitu Nilai SAKIP perangkat daerah tercapai sebesar 108,89%.

3.2.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagaimana berikut

Tabel 3.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
A	MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	%	36,31	37,08	102,12		
1	MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	42,64	43,38	101,73	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan bus AKDP dan kemudahan pengurusan izin • Diterbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta adanya sistem sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) pada perizinan angkutan laut sehingga para pengusaha dapat dengan mudah dan cepat dalam melakukan pengurusan SIUP baru dan atau perubahan • koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien 	
2	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	19,62	21,18	107,95	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamika di lapangan diantaranya penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota 	

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Analisis Keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
							melalui Forum LLAJ, rekomendasi KNKT dan bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien 	
3	MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	46,67	46,67	100,00	Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien	
B	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai Reformasi Birokrasi,93	Angka	70,33	78,28	111,30		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	70	79,25	113,21	Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Angka	70,65	77,31	109,43	Koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Stakeholders terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien	

Sesuai dengan tabel tersebut kinerja dinas perhubungan masuk dalam katagori sangat baik karena hal tersebut didukung oleh faktor sebagaimana tabel.

3.2.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran terdapat alokasi anggaran sehingga perlu adanya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebagaimana tabel.

Tabel 3.6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
A	MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	36,31	37,08	102,12	145.248.607.000	138.516.093.435	95,36	4,64
1	MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	42,64	43,38	101,73	39.887.059.000	38.794.035.991	97,26	2,74
2	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	19,62	21,18	107,95	14.378.697.000	13.544.850.192	94,20	5,80
3	MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	46,67	46,67	100,00	90.982.851.000	86.177.207.252	94,72	5,28
B	MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai Reformasi Birokrasi,93	70,33	78,28	111,30	58.864.258.000	56.103.323.622	95,31	4,69
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	70	79,25	113,21	396412000	373223500	94,15	5,85
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP perangkat daerah	70,65	77,31	109,43	58.467.846.000	55.730.100.122	95,32	4,68

Dalam rangka pencapaian tujuan 1 (satu) Memantapkan Sistem Transportasi yang Berorientasi pada Konektivitas antar Kawasan Pengembangan Di Provinsi Jawa Tengah terealisasi anggaran sebesar Rp 145.248.607.000 atau

95,36% dari total pagu sebesar Rp 145.248.607.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,64% dari Pagu yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 6.732.513.565. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi juga terjadi dalam pencapaian sasaran yang mendukung tujuan tersebut.

Untuk pencapaian tujuan 2 (dua) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terealisasi anggaran sebesar Rp 56.103.323.622 atau 95,31% dari total pagu sebesar Rp 58.864.258.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,69% dari Pagu yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 2.760.934.378. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi juga terjadi dalam pencapaian sasaran yang mendukung tujuan tersebut.

3.2.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2.6.1 Capaian Tujuan 1 : Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di provinsi jawa tengah

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan "Sangat Baik" yaitu dengan capaian tujuan 1 : memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah dengan Indikator persentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di provinsi jawa tengah sebesar 102,12%. Dalam tujuan 1 (satu) memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 3 sasaran dan 4 program dengan tingkat ketercapaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Tahun 2021 (Tujuan Ke-1)

NO	Tujuan/Sasaran/Program / Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Menunjang/Tidak Menunjang
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)	
A	TUJUAN : MEMANTAPKAN SISTEM TRANSPORTASI YANG BERORIENTASI PADA KONEKTIVITAS ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH					
	Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di	%	36,31	37,08	102,12	

	Provinsi Jawa tengah					
1	SASARAN : MENINGKATNYA LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI					
	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	42,64	43,38	101,73	
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
	Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan	%	20,31	21,88	107,73	Menunjang
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	64,7	65,88	101,82	Menunjang
	Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	%	28,57	28,57	100	Menunjang
	Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum	%	85,58	85,63	100,06	Menunjang
	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	%	4,87	5,14	105,54	Menunjang
	Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	39,56	41,46	104,8	Menunjang
	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	50,15	51,59	102,87	Menunjang
	Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	82,49	83,77	101,55	Menunjang
	Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	78,08	79,26	101,51	Menunjang
	Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	48,99	50,28	102,63	Menunjang
1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
	Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	%	64,43	60,67	94,16	Menunjang
	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	%	40,86	47,39	115,98	Menunjang
1.3	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN					
	Persentase Fasilitas pembangunan infrastruktur transportasi strategis	%	33,33	33,33	100	Menunjang
2	SASARAN : MENINGKATNYA KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI					
	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	19,62	21,18	107,95	
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN					

	JALAN (LLAJ)					
	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	%	23,86	25,06	105,03	Menunjang
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	46,15	53,85	116,68	Menunjang
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	30	35	116,67	Menunjang
	Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	%	3,89	3,89	100	Menunjang
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	18,75	21,88	116,69	Menunjang
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	17,24	20,69	120,01	Menunjang
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	15,38	19,23	125,03	Menunjang
	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	37,5	43,75	116,67	Menunjang
2.2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	%	25	25	100	Menunjang
2.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					
	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	%	9,09	9,09	100	Menunjang
3	SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI					
	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	46,67	46,67	100,00	
3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	%	31,92	31,92	100	Menunjang
	Total Indikator Program				24	
	Total Sangat Tinggi				24	
	Total Tinggi				0	
	Total Sedang				0	
	Total Rendah				0	
	Total Sangat Rendah				0	

Sumber : e-controlling 2021

a. Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi

Sasaran berupa Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi dengan indikator Persentase layanan jaringan distribusi transportasi capaiannya 100,02 % dengan realisasi 43,38% dari target 42,64 %. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Penerbangan dengan ketercapaian sebagaimana berikut :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai 10 (sepuluh) indikator yang mendukung capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi dengan tingkat ketercapaian indikator Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan capaiannya 107,73% dengan realisasi 20,31% dari target 21.88%; indikator Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B capaiannya 101,82 % dengan realisasi 65,88% dari target 64,7 %; indikator Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis capaiannya 100 % dengan realisasi 28,57% dari target 28,57 %; indikator Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum capaiannya 100,06 % dengan realisasi 85,63% dari target 85,58 %; indikator Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM capaiannya 105,54 % dengan realisasi 5,14% dari target 4,87 %; indikator Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B capaiannya 104,8 % dengan realisasi 41,46% dari target 39,56 %; indikator Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A capaiannya 102,87 % dengan realisasi 51,59% dari target 50,15 %; indikator Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A capaiannya 101,55 % dengan realisasi 83,77% dari target 82,49 %; indikator Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A capaiannya 101,51 % dengan realisasi 79,26% dari target 78,08 %; indikator Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A capaiannya 102,63 % dengan realisasi 50,28% dari target 48,99 %.

Ketercapaian pada indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) masuk dalam katagori **sangat tinggi** hal ini dipengaruhi adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan bus AKDP. Jumlah angkutan umum yang ber SPM sampai dengan tahun 2021 terealisasi 331 kendaraan dari ditargetkan 314 kendaraan dari total jumlah angkutan umum yang terdaftar 6.445 kendaraan atau 5,21%. Pembaharuan izin AKDP sampai dengan tahun 2021 terealisasi 4.155 kendaraan dari ditargetkan 4.069 kendaraan.

Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan sampai dengan tahun 2021 terealisasi sesuai target melalui pembangunan terminal Kutoarjo (tahap 1) dan peningkatan terminal di 6 terminal (Terminal Penggaron, Purwodadi, Pilangsari, Purbalingga, Tanjung, Madureso). Trayek angkutan aglomerasi dan perintis sampai dengan tahun 2021 terealisasi 6 trayek (sesuai dengan target) karena pada TA. 2021 terdapat tambahan operasional koridor baru trans jateng Koridor Semarang- Gubug pada 13 Oktober 2021 sehingga total trans jateng yang beroperasi sebanyak 6 (enam) koridor.



Gambar 3.1 Peresmian Trans Jateng Koridor Semarang- Gubug oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 13 Oktober 2021



Gambar 3.2 Pembangunan Terminal Kutoarjo (tahap 1)

Program Pengelolaan Pelayaran mempunyai 2 (dua) indikator yang mendukung capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi dengan tingkat ketercapaian indikator Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa capaiannya 94,16 % dengan realisasi 60,67% dari target 64,43 %; indikator Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin capaiannya 115,98 % dengan realisasi 47,39% dari target 40,86 %. Ketercapaian pada indikator Program Pengelolaan Pelayaran masuk dalam katagori **sangat tinggi** hal ini dipengaruhi adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan. Jumlah perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin sampai dengan tahun 2021 terealisasi 254 kendaraan dari ditargetkan 219 kendaraan dari total perusahaan di Jateng 536 perusahaan atau sebesar 48,88% (Jasa Pengurusan Transportasi, Depo Peti Kemas dan Bongkar Muat). Namun terdapat indikator yang tidak tercapai 100% yaitu Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain dikeluarkannya peraturan Bupati Jepara nomor 26 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dengan pembatasan moda transportasi.

Program Pengelolaan Penerbangan mempunyai 1 (satu) indikator yang mendukung capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Jaringan Distribusi Transportasi dengan tingkat ketercapaian indikator Persentase Fasilitas

pembangunan infrastruktur transportasi strategis capaiannya 100 % dengan realisasi 33,33% dari target 33,33 %. Ketercapaian pada indikator Program Pengelolaan Penerbangan masuk dalam katagori **sangat tinggi** dengan indikarot fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis sampai dengan tahun 2021 terealisasi 5 kegiatan (sesuai dengan target) karena pada TA. 2021 dilakukan fasilitasi sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu dukungan/fasilitasi pengembangan Bandar Udara Ngloram di Kabupaten Blora berupa sharing pembebasan lahan 30.792 m2 senilai Rp.14.951.000.000,-untuk jalan akses masuk bandara, jalan akses kendaraan PK-PPK, Gedung PK-PPK dan Gedung operasional. Pada Tanggal 26 November Tahun 2021 Launching penerbangan perdana maskapai Citylink dengan rute Jakarta-Cepu dan Cepu-Jakarta setiap hari Senin dan Jum'at serta dukungan/fasilitasi pengembangan Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa di Kabupaten Jepara berupa sharing pembebasan lahan 16.010 m2 senilai Rp. 7.532.000.000 untuk pembangunan Gedung terminal dan fasilitas darat lainnya.



Gambar 3.3 Peresmian Peresmian Bandara Ngloram oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Desember 2021



Gambar 3.4 Fasilitas Pengembangan Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa di Kabupaten Jepara

b. Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi

Sasaran berupa Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi capaiannya 107,95% dengan realisasi 21,18% dari target 19,62%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan ketercapaian sebagaimana berikut :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai 8 (delapan) indikator yang mendukung capaian Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan tingkat ketercapaian indikator Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang capaiannya 105,03 % dengan realisasi 25,06% dari target 23,86 %; indikator Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B capaiannya 116,68 % dengan realisasi 53,85% dari target 46,15 %; indikator Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B capaiannya 116,67 % dengan realisasi 35% dari target 30 %; indikator Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan capaiannya 100 % dengan realisasi 3,89% dari target 3,89 %; indikator Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana

dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A capaiannya 116,69 % dengan realisasi 21,88% dari target 18,75 %; indikator Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A capaiannya 120,01 % dengan realisasi 20,69% dari target 17,24 %; indikator Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A capaiannya 125,03 % dengan realisasi 19,23% dari target 15,38 %; indikator Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A capaiannya 116,67 % dengan realisasi 43,75% dari target 37,5 %.

Ketercapaian pada indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) masuk dalam katagori **sangat tinggi**. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan sampai dengan tahun 2021 terealisasi 36 lokasi dari ditargetkan 33 lokasi karena pada TA. 2021 dilakukan rehabilitasi di 13 (tiga belas) lokasi Daerah Rawan Kecelakaan. Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang didukung dengan penyediaan perlengkapan jalan yang sampai dengan tahun 2021 terealisasi Rambu 1.078 bh dari ditargetkan 1.078 bh, RPPJ 106 unit dari ditargetkan 106 unit, Marka 154.444 m' dari ditargetkan 153.000 m', Guardrail 466 beam dari ditargetkan 440 beam, LPJU 827 unit dari ditargetkan 793 unit, APILL 8 unit dari ditargetkan 8 unit, WL 24 unit dari ditargetkan 24 unit, Deliniator 1.089 bh dari ditargetkan 994 bh, Cermin Tikungan 51 unit dari ditargetkan 44 unit. Hal ini karena pada TA. 2021 dilakukan pengadaan dan pemasangan Rambu 478 bh, RPPJ 46 unit, Marka 52.444 m', Guardrail 176 beam, LPJU 164 unit, APILL 2 unit, WL 8 unit, Deliniator 333 bh, Cermin Tikungan 16 unit. Jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan sampai dengan tahun 2021 terealisasi 76 orang (sesuai dengan target) pada TA. 2021 tidak ada pelaksanaan kegiatan dikarenakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) unuk mencegah persebaran Covid-19.



Gambar 3.5 Penyediaan Perlengkapan Jalan (LPJU) Terpasang Kiri Ruas Kutoarjo - Bruno Dan Kanan Ruas Karanganyar - Tawangmangu - Kalisoro- Cemorosewu



Gambar 3.6 Pemasangan Perlengkapan Jalan (Guard Rail) Kabupaten Banyumas



Gambar 3.7 Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V

Program Pengelolaan Pelayaran mempunyai 1 (satu) indikator yang mendukung capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan tingkat ketercapaian indikator Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang capaiannya 100 % dengan realisasi 25% dari target 25 %. Ketercapaian pada indikator Program Pengelolaan Pelayaran masuk dalam katagori **sangat tinggi** dengan fasilitas keselamatan pelayaran terpasang sampai dengan tahun 2021 terealisasi 2 (dua) lokasi (sesuai dengan target) karena pada TA. 2021 dilakukan pemasangan di 1 (satu) lokasi



Gambar 3.8 Gambar LPJU Terpasang di Lintas Penyebrangan Sungai Kendal - Batang Ds. Jatipurwo (Kendal) dan Ds. Yosorejo (Batang)

Program Pengelolaan Perkeretaapian mempunyai 1 (satu) indikator yang mendukung capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan tingkat ketercapaian indikator Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api capaiannya 100 % dengan realisasi 9,09% dari target 9,09 %. Ketercapaian pada indikator Program Pengelolaan Perkeretaapian masuk dalam katagori **sangat tinggi** dengan fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api sampai dengan tahun 2021 terealisasi 2 (dua) lokasi (sesuai dengan target) karena pada TA. 2021 dilakukan pemasangan di 1 (satu) lokasi.



Gambar 3.9 Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang (EWS) di Perlintasan Sebidang Kereta Api JPL 251 Kabupaten Klaten

c. Capaian Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi

Sasaran berupa Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi dengan indikator Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal capaiannya 100 % dengan realisasi 46,67% dari target 46,67%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ketercapaian sebagaimana berikut :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

mempunyai 1 (satu) indikator yang mendukung capaian Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi dengan tingkat ketercapaian indikator Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi capaiannya 100 % dengan realisasi 31,92% dari target 31,92 %. Ketercapaian pada indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) masuk dalam katagori **sangat tinggi**. Trayek angkutan aglomerasi dan perintis sampai dengan tahun 2021 terealisasi 6 trayek 98 bus karena pada TA. 2021 terdapat tambahan operasional koridor baru trans jateng Koridor Semarang- Gubug 14 bus pada 13 Oktober 2021 dengan trayek dan jumlah bus tersebut, Angkutan Umum Aglomerasi mempunyai headway 23 menit.



Gambar 3.10 Tampilan Si-Anteng untuk menunjang indikator Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi dan Peresmian trans jateng Koridor Semarang- Gubug

3.2.6.2 Capaian Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan "Sangat Baik" yaitu dengan capaian tujuan 2 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan Indikator persentase Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 111,30% (realisasi nilai reformasi birokrasi 78,28 dari target 70,33. Dalam tujuan 2 (dua) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 1 (satu) program dengan tingkat ketercapaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Tahun 2021 (Tujuan Ke-2)

NO	Tujuan/Sasaran/Program / Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Menunjang/Tidak Menunjang
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)	
A	TUJUAN : MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH					
	Nilai Reformasi Birokrasi,93	Angka	70,33	78,28	111,30	
1	SASARAN : Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah					
	Meningkatnya kualitas pelayanan	Angka	70	79,25	113,21	
1.1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Menunjang
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	Menunjang
2	SASARAN : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah					
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Angka	70,65	77,31	109,43	
2.1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	100	Menunjang
	Total Indikator				9	
	Total Sangat Tinggi				9	
	Total Tinggi				0	

NO	Tujuan/Sasaran/Program / Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Menunjang/Tidak Menunjang
			Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian Kinerja (%)	
	Total Sedang				0	
	Total Rendah				0	
	Total Sangat Rendah				0	

a. Capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran berupa Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan indikator Meningkatnya kualitas pelayanan capaiannya 113,21 % dengan realisasi 79,25 dari target 70 Ketercapaian Sasaran didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah dengan ketercapaian sebagaimana berikut :

Dari Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut, survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada 5 koridor unit pelayanan BRT Trans Jateng dengan jumlah populasi 4.627 orang, pada 24 terminal unit pelayanan Terminal Tipe B di Provinsi Jawa Tengah dengan Jumlah Populasi 4.620 orang serta pada 6 balai unit pelayanan Pembaharuan Izin KPKJP di Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah dengan jumlah populasi 217 Badan Usaha. Teknik penarikan sampel Survei Kepuasan Masyarakat ini dengan menggunakan rumus Krejcie and Morgan dengan keterwakilan sampel pada unit pelayanan BRT Trans Jateng 722 sampel (5 koridor), unit pelayanan Terminal Tipe B 1.251 sampel (22 terminal) dan unit pelayanan pembaharuan izin KPKJP di Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah 195 sampel (6 BPSPP Wilayah). Dari Survei Kepuasan Masyarakat dapat digambarkan rata – rata IKM pada Tahun 2021 untuk masing – masing pelayanan public di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah nilai 3,19, dan nilai hasil IKM 79,75 dengan mutu pelayanan B atau baik kinerjanya. Nilai IKM ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang sebelumnya nilai IKM 3.12 dan nilai hasil IKM 78 dengan mutu pelayanan B atau baik kinerjanya.

b. Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan kegiatan evaluasi SAKIP tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri dan RB) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan evaluasi SAKIP telah dilakukan di 41 SKPD diantaranya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan evaluasi yang dilakukan diantaranya mencari informasi terkait penerapan Sistem AKIP serta melakukan penilaian sistem AKIP. Hasil penilaian evaluasi Sistem AKIP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 75,28 termasuk dalam kategori penilaian BB (Sangat Baik) dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kerja yang handal. Nilai hasil evaluasi tersebut berasal dari 5 (lima) komponen yang dinilai yaitu perencanaan kinerja mendapatkan nilai 25,83 dari bobot penilaian sebesar 30%, Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 19,06 dari bobot penilaian sebesar 25%, Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 8,62 dari bobot penilaian sebesar 15% Evaluasi Kinerja mendapatkan nilai 8,02 dari bobot penilaian sebesar 10% dan Capaian kinerja mendapatkan nilai 13,75 dari bobot penilaian sebesar 10%. Dan disarankan perbaikan dari hasil LHE yaitu

- Memastikan seluruh dokumen SAKIP telah dipublikasikan di website Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat
- Membudayakan pemberian reward and punishment
- Berkoordinasi dengan Bappeda dan Biro Organisasi Setda Prov Jateng untuk menentukan perubahan target kinerja apabila terjadi refocusing anggaran yang berpotensi tercapainya target kinerja yang sudah ditetapkan.
- Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengacu pada Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas eksternal (BPK RI) dan pengawas Internal (APIP) yang belum selesai di tindak lanjuti

Rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti **sebagaimana tabel 2.2**

Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021.

Untuk capaian kinerja non urusan untuk Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah realisasinya telah mencapai dari nilai yang ditargetkan. Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Bidang Perhubungan dan peningkatan

kualitas pelayanan publik, Beberapa kebijakan yang telah diterbitkan selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9. Kebijakan Yang Diterbitkan Tahun 2021

NO.	KEBIJAKAN	PERKEMBANGAN
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.	Sudah ditetapkan
2.	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah nomor 551.2/661/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah nomor 551.2/321/2020 tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuhan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Jawa Tengah.	Sudah ditetapkan
3.	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang dihasilkan berjumlah 103.	Sudah ditetapkan

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun Anggaran 2021, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 204.112.865.000,- dan terelalisasi sebesar 194.619.417.057,- (95,35%). Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2	3	10	11
	Dinas Perhubungan	204.112.865.000	194.619.417.057	95,35
	Sekretariat - Dinas Perhubungan	56.654.123.000	54.087.204.222	95,47
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	56.654.123.000	54.087.204.222	95,47
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	396.412.000	373.223.500	94,15
2	Administrasi Keuangan	40.448.362.000	39.851.229.449	98,52
3	Administrasi Umum	15.760.709.000	13.854.920.773	87,91
4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	48.640.000	7.830.500	16,10
	Bidang Lalu Lintas	5.673.034.000	5.400.652.152	95,20
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.673.034.000	5.400.652.152	95,20
5	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	5.259.700.000	5.082.829.152	96,64
6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	176.207.000	119.096.000	67,59
7	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	134.376.000	116.145.000	86,43
8	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di	102.751.000	82.582.000	80,37

	Jalan			
	Bidang Angkutan Jalan	1.836.342.000	1.568.153.375	85,40
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.836.342.000	1.568.153.375	85,40
9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.434.147.000	1.214.171.775	84,66
10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	228.956.000	210.282.100	91,84
11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	32.800.000	13.911.500	42,41
12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	51.276.000	51.233.000	99,92
13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	60.940.000	50.349.000	82,62
14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	28.223.000	28.206.000	99,94
	Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian	37.395.139.000	36.794.194.823	98,39
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11.972.652.000	11.744.235.835	98,09
15	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	391.644.000	373.521.600	95,37
16	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	11.581.008.000	11.370.714.235	98,18
	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	23.580.487.000	23.247.911.350	98,59
17	Penyelenggaraan Kebandarudaraan	23.580.487.000	23.247.911.350	98,59
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.842.000.000	1.802.047.638	97,83
18	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1.842.000.000	1.802.047.638	97,83
	Bidang Pelayaran	410.905.000	376.275.500	91,57
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	410.905.000	376.275.500	91,57
19	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	64.087.000	64.086.500	100,00
20	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	236.628.000	221.337.000	93,54
21	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	110.190.000	90.852.000	82,45
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	1.505.615.000	1.427.664.112	94,82
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	101.587.000	97.278.800	95,76
22	Administrasi Umum	101.587.000	97.278.800	95,76
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.404.028.000	1.330.385.312	94,75
23	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.165.682.000	1.092.739.312	93,74

24	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	14.387.000	14.387.000	100,00
25	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	169.650.000	168.950.000	99,59
26	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	54.309.000	54.309.000	100,00
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	1.251.947.000	1.142.740.228	91,28
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	61.301.000	49.807.000	81,25
27	Administrasi Umum	61.301.000	49.807.000	81,25
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.190.646.000	1.092.933.228	91,79
28	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.033.350.000	945.268.228	91,48
29	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	4.900.000	4.900.000	100,00
30	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	115.586.000	105.955.000	91,67
31	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	36.810.000	36.810.000	100,00
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	2.047.249.000	1.902.125.680	92,91
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	669.277.000	631.495.750	94,35
32	Administrasi Umum	669.277.000	631.495.750	94,35
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.377.972.000	1.270.629.930	92,21
33	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.020.462.000	941.119.930	92,22
34	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	40.160.000	40.160.000	100,00
35	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	237.360.000	209.360.000	88,20
36	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	79.990.000	79.990.000	100,00
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	1.498.774.000	1.388.006.165	92,61
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	165.623.000	160.028.000	96,62
37	Administrasi Umum	165.623.000	160.028.000	96,62
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.333.151.000	1.227.978.165	92,11
38	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.152.600.000	1.075.659.165	93,32
39	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	18.244.000	18.244.000	100,00
40	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	124.160.000	95.985.000	77,31
41	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	38.147.000	38.090.000	99,85
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	1.436.050.000	1.315.629.570	91,61
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	160.459.000	151.810.600	94,61
42	Administrasi Umum	160.459.000	151.810.600	94,61
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	1.275.591.000	1.163.818.970	91,24

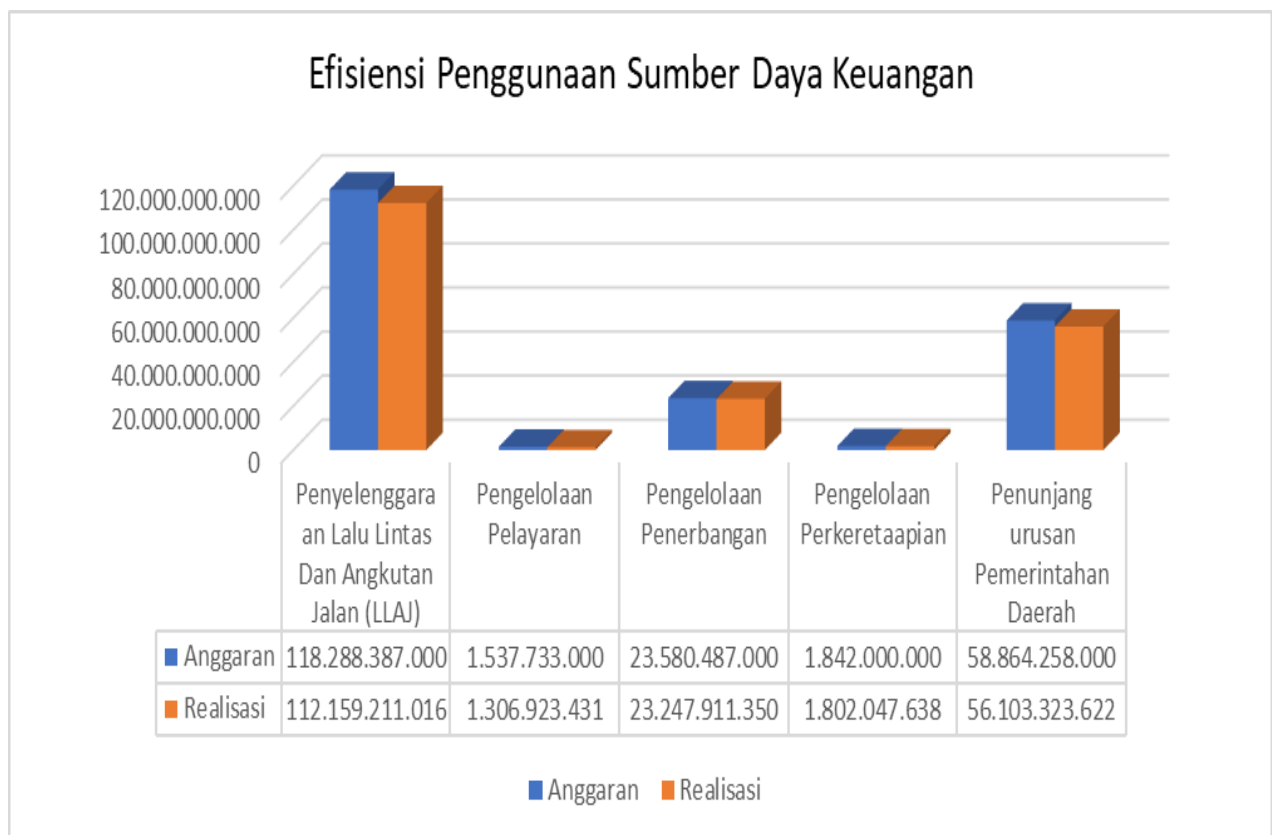
	LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
43	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.041.800.000	930.722.970	89,34
44	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	11.570.000	11.570.000	100,00
45	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	173.275.000	173.107.000	99,90
46	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	48.946.000	48.419.000	98,92
	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	1.468.746.000	1.398.027.147	95,19
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	226.626.000	214.810.350	94,79
47	Administrasi Umum	226.626.000	214.810.350	94,79
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.242.120.000	1.183.216.797	95,26
48	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	991.700.000	933.200.797	94,10
49	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	21.990.000	21.990.000	100,00
50	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	212.320.000	211.916.000	99,81
51	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	16.110.000	16.110.000	100,00
	Balai Transportasi Jawa Tengah	92.934.941.000	87.818.744.083	94,49
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	825.262.000	710.888.900	86,14
52	Administrasi Umum	825.262.000	710.888.900	86,14
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	90.982.851.000	86.177.207.252	94,72
53	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	4.124.234.000	4.039.741.505	97,95
54	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	86.858.617.000	82.137.465.747	94,56
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.126.828.000	930.647.931	82,59
55	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.126.828.000	930.647.931	82,59

Dalam peaksanaan tersebut terdapat kegiatan dengan deviasi anggaran belanja kurang dari 70%, Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Kegiatan dengan penyerapan anggaran dibawah 70% dan justifikasinya sebagaimana berikut :

Tabel 3.11 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI				DEVIASI		JUSTIFIKASI
			FISIK		KEUANGAN		FISIK	KEU	
			Rp	%	Rp	%	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	48.640.000	48.640.000	100	7.830.500	16,10	-	- 83,90	Pelaksanaan diklat dilaksanakan secara virtual untuk meminimalisir tingkat penularan virus covid-19
2	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	32.800.000	32.800.000	100	13.911.500	42,41	-	- 57,59	Pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi dilaksanakan secara virtual untuk meminimalisir tingkat penularan virus covid-19
3	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	176.207.000	176.207.000	100	119.096.000	67,59	-	- 32,41	Penundaan pelaksanaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian

3.3.1 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)** untuk pencapaian sasaran, adalah sebesar Rp 112.159.211.016 atau 94,82% dari total pagu sebesar

Rp 118.288.387.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,18% dari Pagu yang dianggarkan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi terjadi diantaranya karena Pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi dilaksanakan secara virtual untuk meminimalisir tingkat penularan virus covid-19, Penundaan pelaksanaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian, Posko Terpadu Lebaran 2021 dilaksanakan secara terbatas, karena kondisi pandemi Covid-19, Efisiensi pelaksanaan Wastib angkutan umum dan penumpang diperiksa, Adanya penyesuaian terkait dengan pelaksanaan peninjauan lapangan dengan adanya PM 17 tahun 2021 (Kegiatan Andalalin) dan sisa anggaran kontrak.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada **Program Pengelolaan Pelayaran** untuk pencapaian sasaran, adalah sebesar Rp 1.306.923.431 atau 84,99% dari total pagu sebesar Rp 1.537.733.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 15,01% dari Pagu yang dianggarkan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi terjadi diantaranya Pelaksanaan rapat dan koordinasi Pengembangan Pelabuhan di Jateng dilaksanakan secara virtual untuk meminimalisir tingkat penularan virus covid-19, menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan KMC Kartini 1 dan sisa anggaran kontrak.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada **Program Pengelolaan Penerbangan** untuk pencapaian sasaran, adalah sebesar Rp 23.247.911.350 atau 98,59% dari total pagu sebesar Rp 23.580.487.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,41% dari Pagu yang dianggarkan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi tersebut berasal dari sisa anggaran pengadaan lahan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada **Program Pengelolaan Perkeretaapian** untuk pencapaian sasaran, adalah sebesar Rp 1.802.047.638 atau 97,83% dari total pagu sebesar Rp 1.842.000.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,17% dari Pagu yang dianggarkan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Berikut daftar kegiatan dengan serapan dibawah 90%. Efisiensi tersebut berasal dari sisa anggaran kontrak.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan pada **Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah** untuk pencapaian sasaran, adalah sebesar Rp 56.103.323.622 atau 95,31% dari total pagu sebesar Rp 58.864.258.000. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,69% dari Pagu yang dianggarkan. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan target fisik tercapai 100%, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi. Efisiensi tersebut berasal dari Pelaksanaan diklat dilaksanakan secara virtual untuk meminimalisir tingkat penularan virus covid-19, Efisiensi Belanja Telepon, Air dan Listrik (efek *pegawai Work Form Home*) dan sisa anggaran kontrak.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Kesimpulan

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018-2023, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2018-2023 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh "Isu Strategis" sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang Perhubungan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan tercapai dengan Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai 2 (dua) tujuan dan 5 sasaran, yaitu

Tujuan Pertama : Memantapkan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah, dengan sasaran sebagai berikut :

- a) Sasaran 1 : Meningkatkan Layanan Jaringan Distribusi Transportasi dengan indikator Persentase layanan jaringan distribusi transportasi capaiannya 100,02 % dengan realisasi 43,38% dari target 42,64 %. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran dan

Program Pengelolaan Penerbangan dengan ketercapaian sebagaimana berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Capaian kinerja lebih dari 100% yaitu indikator Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan, Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B, Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis, Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum, Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM, Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B, Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A, Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A, Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A, Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A.
Capaian kinerja 100% sesuai target yaitu indikator : Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis.
 - 2) Program Pengelolaan Pelayaran
Capaian kinerja lebih dari 100% yaitu indikator Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin
Capaian kinerja kurang dari 100% yaitu Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa
 - 3) Program Pengelolaan Penerbangan
Capaian kinerja 100% sesuai target Persentase Fasilitas pembangunan infrastruktur transportasi strategis
- b) Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi capaiannya 107,95% dengan realisasi 21,18% dari target 19,62%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program

Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan ketercapaian sebagaimana berikut :

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Capaian kinerja lebih dari 100% yaitu indikator Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang, Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B, Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B, Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan, Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A, Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A, Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A, Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A,

Capaian kinerja 100% sesuai target yaitu indikator Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan

2) Program Pengelolaan Pelayaran

Capaian kinerja 100% sesuai target yaitu indikator Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang

3) Program Pengelolaan Perkeretaapian

Capaian kinerja 100% sesuai target yaitu indikator Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api

- c) Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Angkutan Umum Aglomerasi dengan indikator Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal capaiannya 100 % dengan realisasi 46,67% dari target 46,67%. Ketercapaian Sasaran didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ketercapaian kinerja 100% sesuai target yaitu Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi.

Tujuan Kedua : Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, dengan sasaran sebagai berikut :

a) **Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Dari Survei Kepuasan Masyarakat dapat digambarkan rata – rata IKM pada Tahun 2021 untuk masing – masing pelayanan public di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah nilai 3,19, dan nilai hasil IKM 79,75 dengan mutu pelayanan B atau baik kinerjanya. Nilai IKM ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang sebelumnya nilai IKM 3.12 dan nilai hasil IKM 78 dengan mutu pelayanan B atau baik kinerjanya.

b) **Sasaran 2** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Hasil penilaian evaluasi Sistem AKIP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 75,28 termasuk dalam katagori penilaian BB (Sangat Baik) dengan interpretasi sangat baik, akuntable, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kierja yang handal.

2. Tingkat capaian kinerja pada tujuan 1 Dinas Perhubungan tahun 2021 sebesar 102,12% atau sangat tinggi, sedangkan tingkat capaian tahun 2021 sebesar 100% peningkatan tersebut karena peningkatan outcome pada indikator Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum melebihi target disebabkan karena dipengaruhi adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan bus AKDP serta kemudahan dalam pengurusan izin dan untuk indikator Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan disebabkan karena dinamika di lapangan diantaranya penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Forum LLAJ, rekomendasi KNKT dan bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan.
3. Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2021 terhadap target Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebesar 87.51% sedangkan tingkat capaian kinerja di tahun 2021 102.12% dengan katagori "**Sangat Baik**"
4. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dengan menggunakan anggaran kurang dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 194.619.417.057,00 atau (95,35%) dari total anggaran sebesar Rp. 204.112.865.000,00

4.1.2 Saran

Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja yang dihadapi di antaranya :

1. Adanya regulasi atau peraturan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui SE Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri tahun 1442 H serta SE nomor 22 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemic corona virus disease 2019 (Covid 19) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Tahun 2021.
2. KMC kartini I Lintas Semarang – Karimunjawa usia kapal relatif tua (17 tahun).

Strategi mengatasi masalah tersebut yaitu :

1. Posko perbatasan pemantauan pencegahan arus masuk ke Jawa Tengah dengan meniadakan Posko Lebaran TA 2021.
2. Penghapusan asset KMC Kartini I (Penghapusan disetujui namun perlu Apprasial Ulang KMC Kartini, hasil tindaklanjut rapat dengan Komisi C pada Tanggal 16 September 2021 karena Apprasial disusun Tahun 2019, sesuai PMK Nomor 27/PMK.06/2016 masa berlaku Apprasial 12 Bulan).



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Siliwangi Nomor 355 – 357 Semarang 50146 Telepon 024-7604640, 7605660, 7605700
Faksimile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>
Suratelektronik : perhubungan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Jabatan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP
Jabatan Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, M IP

Semarang, 27 Januari 2021

Pihak Pertama
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19710914 199703 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Tujuan 1			
	Pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	Prosentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	42,37 %
Sasaran 1.1			
1.	Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Prosentase layanan jaringan distribusi transportasi	49,08 %
2.	Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Prosentase Pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	31,36 %
3.	Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi	Prosentase operasional angkutan umum Aglomerasi yang nyaman dan handal	46,67 %
Tujuan 2			
	Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Reformasi Birokrasi	70,33
Sasaran 2.1			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	70
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP perangkat daerah	70,65

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 127.554.173.000,-	APBD
2. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 2.557.000.000,-	APBD
3. Program Pengelolaan Penerbangan	Rp. 29.028.272.000,-	APBD
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 1.884.000.000,-	APBD
5. Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah	Rp. 74.609.298.000,-	APBD

Semarang, 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH



H.GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710914 199703 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Siliwangi Nomor 355 – 357 Semarang 50146 Telepon 024-7604640, 7605660, 7605700
Faksimile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>
Surateletronik : perhubungan@jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

Semarang, 2021
Pihak Pertama
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris


HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710914 199703 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Tujuan 1			
	Pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah	Prosentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah	36,31%
Sasaran 1.1			
1.	Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Prosentase layanan jaringan distribusi transportasi	42,64%
2.	Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	Prosentase Pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	19,62%
3.	Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi	Prosentase operasional angkutan umum Aglomerasi yang nyaman dan handal	46,67%
Tujuan 2			
	Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Reformasi Birokrasi	70,33
Sasaran 2.1			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat	70
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Nilai SAKIP perangkat daerah	70,65

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 118.788.387.000,-	APBD
2. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 1.537.733.000,-	APBD
3. Program Pengelolaan Penerbangan	Rp. 23.580.487.000,-	APBD
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp. 1.842.000.000,-	APBD
5. Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah	Rp. 58.864.258.000,-	APBD


Semarang,

2021

GUBERNUR JAWA TENGAH

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris

H.GANJAR PRANOWO, SH, M.IP


HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710914 199703 1 006